

**LAPORAN TESIS**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN  
DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT I  
PUSDOKKES POLRI**



diajukan oleh:

Hani Khairina

NIM 21.C2.0096

**kepada**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

**LAPORAN TESIS**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN  
DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT I  
PUSDOKKES POLRI**

Untuk Memenuhi Sebagai persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2



diajukan oleh:

Hani Khairina

NIM 21.C2.0096

**kepada**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada kesehatan fisik dan psikologis korban sehingga memerlukan penanganan medis dan perlindungan hukum terpadu. Perlindungan tersebut telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Kesehatan, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi di rumah sakit, khususnya dalam peran medikolegal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual; (2) bagaimana implementasi pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum tersebut di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Puskokes Polri; serta (3) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan mengombinasikan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Kedokteran Kepolisian, Kepala Instalasi Sentra Visum dan Medikolegal (SENVIS), serta dokter pemeriksa, yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan analisis dokumen Pedoman Sentra Visum dan Medikolegal Tahun 2021. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur secara komprehensif pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk kewajiban pemberian pelayanan medis, psikologis, serta penerbitan visum et repertum sebagai alat bukti hukum. Implementasi di RS Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri telah berjalan secara profesional melalui sistem pelayanan satu pintu (*one gate service*) yang melibatkan tenaga medis forensik, psikolog, dan penyidik. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas ramah anak, koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial dan psikologis korban dan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem pelayanan telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional, penguatan masih diperlukan melalui digitalisasi layanan medikolegal (E-Visum), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan pembiayaan lintas sektor agar perlindungan hukum dan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak

## **ABSTRACT**

*Sexual violence against children constitutes a violation of human rights with serious physical and psychological impacts, requiring integrated medical care and legal protection. Such protection is regulated under the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the Health Law; however, its effectiveness depends on implementation within healthcare facilities, particularly hospitals with medicolegal functions.*

*This study aims to address three main research questions: (1) how Indonesian positive law regulates health services and legal protection for child victims of sexual violence; (2) how such health services and legal protection are implemented at Bhayangkara Level I Hospital, Puskor Polri; and (3) what obstacles are encountered in their implementation.*

*This research employs an empirical juridical approach by combining statutory analysis with field data. Data were collected through interviews with three key informants, namely the Head of Police Medical Services, the Head of the Visum et Repertum and Medicolegal Center (SENVIS), and the examining physician, complemented by field observations and document analysis of the 2021 Guidelines for Visum et Repertum and Medicolegal Services. The data were analyzed using qualitative methods.*

*The results indicate that Indonesian positive law provides a comprehensive legal framework governing health services and legal protection for child victims of sexual violence, including medical and psychological care as well as the issuance of visum et repertum as lawful scientific evidence. The implementation at Bhayangkara Level I Hospital, Puskor Polri, has been conducted professionally through a one-gate service system involving forensic medical personnel, psychologists, and investigators. However, such legal protection has not yet been fully optimal due to limitations in human resources, the availability of child-friendly facilities, inter-agency coordination, and social as well as psychological factors affecting victims and their families. Therefore, this study concludes that although the service system is in accordance with national legal provisions, further strengthening is required through the digitalization of medicolegal services (E-Visum), enhancement of human resource capacity, and cross-sectoral financing policies to ensure effective and sustainable legal and health protection for child victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Health Services, Legal Protection, Child Sexual Violence*